

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis melakukan beberapa riset dari berbagai macam penelitian yang sudah ada sebelumnya. Hal ini penulis lakukan guna menambah wawasan terkait pandangan penulis dalam melakukan penelitian dan juga menghindari terjadinya plagiarisme. Penulis menemukan beberapa penelitian yang masih berkaitan dengan topik yang akan diangkat oleh penulis yaitu dalam sektor jaringan dan telekomunikasi. Penelitian tersebut membahas tentang aspek-aspek perpajakan dari sisi perusahaan telekomunikasi.

Penulisan karya tulis ini memiliki referensi dari dua penelitian, yang pertama KTTA Nur Azizah Hasmin (2018) yang membahas tentang aspek pemotongan pajak atas transaksi yang dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Penelitian ini masih mencakup dengan penelitian karya tulis penulis, yaitu masih berhubungan dengan transaksi atas jasa telekomunikasi. Kemudian yang kedua dari Jurnal Ibrahim (2010) yang membahas tentang manajemen pajak pada industri penyedia jasa telekomunikasi. Dari jurnal ini penulis mengambil

referensi tentang bentuk manajemen dan proses bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Tabel II.2 Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Jenis, Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Analisis Potensi Pajak Penghasilan 23 Atas Transaksi Jasa dan Sewa Pada PT Telekomunikasi Indonesia, KTTA, Nur Azizah Hasmin, 2018	Mengidentifikasi potensi pemotongan pajak atas transaksi yang dilakukan PT Telekomunikasi Indonesia	Memfokuskan pada aspek perpajakan atas lawan transaksi dari PT Telekomunikasi Indonesia sebagai pemotong pajak dalam transaksi jasa interkoneksi
2.	Analisis Manajemen Pajak Pada Industri Penyedia Jasa Telekomunikasi, Jurnal, Iim Ibrahim Nur, 2010	Membahas aspek pajak dari laporan keuangan fiskal dan manajemen proses bisnis dari Industri penyedia jasa telekomunikasi	Memfokuskan terhadap aspek pajak dari manajemen dan proses bisnis yang dilakukan oleh PT Anugerah Communication

Sumber: Diolah penulis

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bisnis

Menurut Allan Afuah (2004), bisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang dilakukan individu atau kelompok secara terstruktur dengan menjual barang atau jasa agar memperoleh penghasilan dan keuntungan, agar bisa memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Sedangkan Ebert dan Griffin (2007) berpendapat bahwa bisnis

adalah sebuah organisasi yang bekerja guna menghasilkan barang dan/atau jasa, kemudian akan dijual ke masyarakat yang membutuhkan guna mendapatkan keuntungan.

Hughes dan Kapoor (dalam Alma & Buchari, 2010) menyatakan bisnis merupakan kegiatan individu atau organisasi yang dilakukan secara teratur dengan menghasilkan barang lalu menjualnya guna mendapatkan keuntungan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian, Muhammad Hendrizal (2014) berpendapat bahwa bisnis dapat diartikan sebagai usaha dalam mengelola produk dan jasa guna memperoleh keuntungan agar bisa menghidupi diri, keluarga, dan lingkungan, melalui kegiatan yang bermanfaat melalui ide, tenaga kerja, modal, keterampilan, serta inovasi. Selain itu, bisnis juga diartikan sebagai usaha yang terorganisir dengan menggunakan berbagai sumber daya guna menjalankan proses bisnis yang dilakukan serta kreativitas dalam menghasilkan produk barang atau jasa yang akan dijual serta bermanfaat bagi masyarakat umum. (Margie et al., 2020).

Sesuai penjelasan beberapa ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok orang dengan cara membuat barang dan/atau jasa lalu menjualnya kepada masyarakat yang memerlukan guna memperoleh keuntungan atas apa yang telah ia kerjakan.

2.2.2 Proses Bisnis

Setiap perusahaan atau organisasi yang menjalankan suatu usaha tentu saja berpegang pada pengaturan proses dan dilakukan secara berkelompok maupun secara tim. Proses ini disebut dengan proses bisnis, yang merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pendirian usaha suatu perusahaan (Duarte et al., 2006).

Davenport & Short (dalam Malhotra, 1998) menjelaskan proses bisnis merupakan aktivitas yang terukur serta terstruktur guna menghasilkan *output* bagi pelanggan tertentu. Artinya, perusahaan mempunyai urutan aktivitas kinerja serta *input* dan *output* yang jelas.

Menurut Systems (2004), proses bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kumpulan organisasi yang disusun secara kompleks dan dinamis untuk mengerjakan suatu aktivitas guna menghasilkan suatu keluaran yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan hal tersebut. Sedangkan, Weske (2007) menyatakan bahwa proses bisnis diartikan sebagai rangkaian instrument yang digunakan suatu organisasi guna mengatur dan mengorganisir seluruh aktivitas kegiatan yang akan dilakukan guna meningkatkan pemahaman dan aktivitas suatu produksi atas bisnis yang dilakukan.

Adapun Yunis (2010) berpendapat bahwa proses bisnis merupakan kumpulan aktivitas bisnis, data, serta informasi yang ada baik dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi. Selain itu proses bisnis adalah representasi formal, alat, serta informasi demi jalannya bisnis yang dilakukan perusahaan baik dari sisi menilai, merubah dan merancang (Consortium, 2010).

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas, proses bisnis dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terstruktur, agar bisa mencapai tujuan awal yang diinginkan pada saat pendirian perusahaan dengan cara mengelola *input* sesuai dengan *output* yang akan dihasilkan nantinya. Serta proses bisnis dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan sistem informasi.

2.2.3 Pemotongan Pajak Penghasilan

Pemotongan pajak penghasilan merupakan mekanisme dimana pemberi penghasilan harus memotong pajak dari pembayaran yang diberikan kepada penerima penghasilan, yang mana harus sesuai dengan tarif dan dasar pengenaan pajak dalam aturan yang berlaku. Salah satu ahli dalam buku Manajemen Perpajakan, Anwar (2013) menjelaskan bahwa pemotongan pajak penghasilan merupakan mekanisme yang memberikan tanggung jawab pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atas pajak penghasilan atas transaksi yang dikenakan pajak.

Menurut Sandra (2021), pemotongan pajak penghasilan dapat diartikan bahwa pihak pemberi penghasilan akan melakukan pemotongan jumlah pembayaran yang telah disepakati yang disebut sebagai Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan tarif dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme ini, pemotongan tentu saja memiliki keunggulan dalam prosesnya yaitu menggunakan sistem *Withholding Tax*. Artinya, pemotong dan pemungut bukanlah subjek pajak, melainkan diberi tanggungjawab untuk memotong, menyetorkan, dan melaporkan semua penghasilan yang dipotong (Sari, 2016).

Pemotongan pajak penghasilan sejalan dengan salah satu asas perpajakan yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *Wealth Of Nation* (Soemarso, 2007) yaitu asas *Convienience of Payment* yang artinya pemotongan pajak harus dalam kurun waktu yang tepat. Contohnya, ketika wajib pajak menerima

penghasilan atas pekerjaannya, maka langsung dipotong oleh pemberi penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku.

2.2.4 Jasa Konstruksi

Menurut Dipohusodo (1996), jasa konstruksi dapat diartikan sebagai kegiatan atau proyek yang berhubungan dengan upaya pembangunan suatu infrastruktur bangunan, yang didalamnya mencakup kegiatan dari perencanaan, arsitektur, dan teknik sipil. Sedangkan Rudi dan Waluyo (2017) menyatakan bahwa jasa konstruksi merupakan kegiatan yang umumnya dilaksanakan hanya sekali dalam jangka waktu tertentu yang mengolah beberapa sumber daya menjadi sebuah proyek dan kegiatan yang menghasilkan suatu bangunan. Selain itu, Yanuarius (2015) berpendapat bahwa jasa konstruksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang secara khusus bergerak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan yang berkaitan dengan pekerjaan arsitek, sipil, serta tata lingkungan untuk mendirikan suatu bangunan berbentuk fisik yang nantinya dapat digunakan.

Ervianto (2005) membagi jasa konstruksi menjadi tiga bagian proyek, yaitu:

1. Jasa Konstruksi Gedung

Jasa konstruksi gedung nantinya ini akan membangun sebuah bangunan yang nantinya akan digunakan sebagai fasilitas bagi masyarakat umum, misalnya sekolah, pusat perbelanjaan, rumah sakit, apartemen, gedung kantor, dan masih banyak lagi.

2. Jasa Konstruksi Teknik

Jasa konstruksi teknik merupakan jasa yang menggunakan struktur-struktur yang telah didesain secara khusus oleh orang tertentu yang ahli dibidangnya, guna

memenuhi kebutuhan infrastruktur bagi orang banyak. Contohnya adalah konstruksi jalan tol, drainase, dan jembatan.

3. Jasa Konstruksi Industri

Jasa konstruksi industri umumnya memiliki sifat khusus dan tingkatnya lebih tinggi karena dalam pelaksanaannya membutuhkan banyak spesifikasi dan persyaratan khusus. Contoh dari konstruksi ini yaitu kilang minyak, pembangkit listrik, pabrik bahan kimia, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, jasa konstruksi merupakan jasa yang melibatkan beberapa sumber daya yang akan digunakan dalam proyek kegiatan pembangunan sesuai dengan bagian proyek jasa konstruksinya, dan hasil dari pembangunan tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum yang membutuhkannya.

2.2.5 Menara Telekomunikasi

Base Transceiver Station (BTS) atau yang dikenal dengan menara telekomunikasi merupakan salah satu jenis bangunan yang terdapat dalam jasa telekomunikasi. Bangunan ini memiliki tinggi sekitar 40 sampai 75 meter Baktikominfo (2019) dan digunakan oleh operator jaringan untuk memperluas cakupan sinyal agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Artinya, semakin banyak jumlah penduduk suatu negara maka kebutuhan akan cakupan sinyal telekomunikasi semakin meningkat (Palilu, 2015). Hal ini menyebabkan setiap operator jaringan saling berkompetisi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan yang menggunakan jaringan mereka.

Menara telekomunikasi memiliki tiga macam jenis menara yang sering dijumpai, yaitu (Baktikominfo, 2019):

1. Menara 4 kaki (*Rectangular Tower*)

Bangunan menara ini merupakan bangunan yang paling kokoh diantara menara yang lain, karena memiliki fondasi yang ditopang oleh empat kaki. Tinggi menara ini kurang lebih 42 meter yang mencakup radio dan antena. Harga untuk menara ini bisa mencapai sekitar 650 juta sampai 1 miliar rupiah, sehingga biasa digunakan oleh operator telekomunikasi yang cukup terkenal seperti Telkomsel, XL, dan lainnya.

2. Menara 3 kaki (*Triangle Tower*)

Bangunan menara jenis ini berbentuk segitiga dan ditopang oleh tiga kaki. Tinggi menara ini sekitar 40 sampai 60 meter. Dalam pembangunan menara ini biaya yang dibutuhkan lebih hemat dibanding menara empat kaki, karena bahan produksi tidak sebanyak menara empat kaki. Dalam hal keamanan, semakin pendek menaranya maka tingkat keamanan semakin tinggi.

3. Menara 1 kaki (*Pole*)

Bangunan menara ini merupakan bangunan yang paling memiliki banyak kekurangan dalam strukturnya. Hal ini menyebabkan dapat mengganggu sistem koneksi dalam jangka waktu yang lama seperti jaringan yang tidak stabil dan mudah goyang. Menara ini memiliki tinggi tidak melebihi 20 meter.

Dalam penggunaan menara telekomunikasi, umumnya bisa memuat tiga sampai lima operator atau *provider* di dalamnya. Seperti, satu menara bisa memuat

operator telkomsel, xl, indosat, dan lainnya. Makanya, menara telekomunikasi biasa disebut menara bersama (Palilu, 2015).

2.2.6 Pengertian Sewa

Menurut Prof. Subekti (1982), sewa adalah kondisi suatu pihak mampu untuk menyerahkan suatu benda untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya memiliki kesanggupan untuk membayar sesuai dengan harga yang ditentukan untuk pemakaian barang tersebut. Sedangkan Yahya (1986), berpendapat bahwa sewa merupakan persetujuan yang terjadi antara dua pihak, yaitu yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan nantinya akan menyerahkan barang yang disewa oleh pihak penyewa untuk digunakan, dan pihak penyewa bersedia membayar sesuai dengan kesepakatan.

Wiryono (1981) menyatakan bahwa sewa adalah suatu penyerahan barang oleh seseorang sebagai pemilik kepada orang lain untuk menggunakan barang tersebut dengan memiliki syarat yaitu pembayaran uang sewa oleh penyewa kepada pemilik. Selain itu, Pradnyaswari (2013) berpendapat sewa adalah suatu perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yaitu pihak penyewa dan pihak pemberi sewa yang telah bersepakat dan tanpa ada paksaan antara satu sama lain untuk meminjamkan barangnya selama beberapa waktu dan ditukarkan dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

Adapun Mendrofa (2016) berpendapat bahwa sewa merupakan suatu konsep tercapainya dua unsur pokok, yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah memberikan barangnya untuk digunakan oleh pihak lain, dan pihak lain tersebut wajib untuk membayar sesuai harga atas sewa tersebut.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, sewa dapat disimpulkan sebagai suatu konsep yang hampir sama dengan jual beli yaitu saat dua pihak melakukan kesepakatan, tetapi pihak yang menyewakan menyerahkan barang kepada pihak yang menyewa dengan jangka waktu tertentu, dengan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan, dan barang tersebut nantinya akan digunakan oleh pihak penyewa

2.2.7 Perusahaan Telekomunikasi

Nugraha (2020) menyatakan bahwa perusahaan merupakan salah bentuk organisasi yang memiliki ikatan hukum yang tetap untuk menjalankan kegiatan transaksi atau usaha untuk memperoleh keuntungan. Salah satu jenis perusahaan adalah perusahaan telekomunikasi. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang paling dinamis, karena harus untuk mengikuti perkembangan zaman salah satunya perkembangan teknologi agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (Pranoto, 2016).

Perkembangan perusahaan telekomunikasi sangat pesat disebabkan karena teknologi telekomunikasi bersifat global dan penerapannya itu terintegrasi, yang menyebabkan banyak perusahaan di dunia bergerak di bidang telekomunikasi Nirmala Purba (2016). Hal ini mengingat kebutuhan akan telekomunikasi di era sekarang itu sangat banyak.

Perusahaan dunia yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, antara lain (Wahyono, 2021):

1. AT&T (Amerika Serikat)
2. Verizon Wireless (Amerika Serikat)
3. Nippon Telegraph and Telephone (Jepang)

4. Comcast (Amerika Serikat)
5. Deutsche Telekom (Jerman)
6. SoftBank (Jepang)
7. Telefonica (Spanyol)
8. América Móvil (Mexico)
9. China Telecom (China)
10. Vodafone (Inggris)

Semua perusahaan ini terkenal di berbagai negara karena pendapatan perusahaan tersebut merupakan pendapatan terbesar dari sisi perusahaan telekomunikasi.

Di Indonesia sendiri tentu saja memiliki perusahaan telekomunikasi. Sampai sekarang Indonesia memiliki lima perusahaan telekomunikasi terbesar, yaitu (Kominfo, 2017):

1. PT. Hutchhison 3 Indonesia (Tri)
2. PT. XL Axiata (XL)
3. PT. Indosat
4. PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
5. PT. Smartfren

Berdasarkan data diatas, perusahaan telekomunikasi tentu saja saling bersaing untuk memberikan pelayanan yang prima kepada penggunanya. Salah satunya yaitu dengan memperluas cakupan sinyal agar dapat dijangkau. Dalam memperluas jaringan itu, tentu saja membutuhkan salah satu jenis jasa telekomunikasi yaitu jasa interkoneksi yang disediakan oleh perusahaan yang bergerak dibidang tersebut.

2.2.8 Jasa Interkoneksi

Jasa interkoneksi merupakan salah satu bentuk jasa telekomunikasi yang menghubungkan antar-jaringan telekomunikasi dari penyelenggara yang jaringan telekomunikasinya berbeda, guna memberikan jaminan kepada pelanggan agar dapat mengakses jasa telekomunikasi (Nadie, 2013).

Adapun pendapat Shy (dalam Atmadji, 2012) menyatakan bahwa jasa interkoneksi adalah skema industri jasa jaringan yang melibatkan beberapa perusahaan di mana perusahaan tersebut harus menerima permintaan pesaingnya untuk menggunakan jaringan yang dimilikinya. Industri yang dimaksud yaitu dimana pihak lain juga dapat memanfaatkan jaringan tersebut.

Salah satu bentuk jasa interkoneksi yaitu akses penyediaan menara telekomunikasi yang nantinya bisa disewa oleh operator untuk perluasan akses jaringan kepada pelanggan. Akibat dari adanya penyediaan menara ini yaitu kondisi jaringan operator akan menjadi semakin luas dan simetris, serta akan membuat perusahaan semakin dominan (Atmadji, 2012).

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa jasa interkoneksi merupakan salah satu jenis jasa telekomunikasi. Jasa ini umumnya disediakan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Salah satu bentuk jasanya yaitu penyediaan dan penyewaan akses menara telekomunikasi kepada operator telekomunikasi guna memperluas jaringan operator tersebut. Nantinya, operator atau perusahaan telekomunikasi akan melakukan kontrak dengan perusahaan tersebut, kemudian akan membayar kepada perusahaan jasa interkoneksi sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati guna memperoleh akses menara telekomunikasi agar jaringan

operator tersebut bisa semakin luas dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum untuk menggunakan layanan jaringan tersebut.